

**ARTIKEL ILMIAH**

**PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

*Development and Upgrading of Seven Universities in Improving  
The Quality and Relevance of Higher Education in Indonesia*



**JUDUL :**

**POTRET IMPLEMENTASI PRAKERIN  
SISWA SMK PROGRAM KEAHLIAN  
TEKNIK BANGUNAN**

**Oleh:**

**Drs. Darmono, M.T./ NIDN: 0005086414**

**Prof . Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T./ NIDN: 0009085002**

**Dr. Ir. Bambang Sugestiyadi, M.T./ NIDN: 0017025304**

**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVESITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SEPTEMBER 2014**

## **POTRET IMPLEMENTASI PRAKERIN SISWA SMK PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK BANGUNAN**

### **RINGKASAN**

Pelajaran praktik kejuruan yang diselenggarakan di SMK biarpun ditunjang dengan peralatan yang lengkap dan modern, pada dasarnya hanya mampu menyajikan dasar-dasar keterampilan dalam situasi tiruan (*simulasi*), karena itu sulit diharapkan untuk dapat membentuk keahlian profesional pada siswa. Keahlian profesional yang harus dikuasai pada dasarnya mengandung unsur: (1) pengetahuan teknik, dan (2) kiat (*arts*). Unsur ilmu pengetahuan dan teknik dapat dipelajari di sekolah, sedangkan unsur “*kiat*” adalah sesuatu yang tidak dapat diajarkan, tetapi dapat dikuasai melalui proses pembiasaan (*habit forming*) dan internalisasi. Unsur “*kiat*” yang menjadi faktor utama penentu kadar keprofesionalan seseorang hanya dapat dikuasai melalui cara mengerjakan langsung pekerjaan pada bidang profesi itu sendiri, karena itu suatu ukuran keahlian profesional berdasarkan jumlah pengalaman kerja. Keberhasilan pendidikan vokasional (SMK) tidak hanya diukur dari segi mutunya saja melainkan juga dari segi relevansinya. Hubungan mutu dan relevansi ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Mutu lulusan pendidikan vokasional (SMK) dianggap relevan oleh para pengguna lulusan, yang dalam hal ini adalah sektor dunia usaha dan dunia industri (DUDI) apabila apa yang mereka dapatkan sama dengan atau lebih besar dari yang mereka harapkan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian survei, dengan tahapan penelitian, meliputi: studi literatur, observasi, dan evaluasi serta studi kasus yang akan dilakukan pada SMK di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Indikator penelitian meliputi: (1) Manajemen SMK, (2) PBM dan Pelatihan, (3) Kinerja guru, (4) Mitra Dunia Usaha dan Industri (DUDI), (5) Fasilitas, sarana dan prasarana PBM, dan Pelatihan Keterampilan, dan (6) Level kualifikasi kompetensi dan hasil produk pendidikan di SMK.

Potret manajemen implementasi prakerin yang dilaksanakan di SMK belum ideal sebab dalam implementasinya belum ada tahap: (1) ujian pembekalan, (2) tahapan bagi siswa yang tidak lulus pembekalan, (3) tahapan bagaimana bila pencarian tempat prakerin ditolak oleh pihak industri, (4) tahap bimbingan penyusunan laporan prakerin, dan (5) ujian prakerin. Dengan demikian perlu adanya penyusunan model manajemen prakerin yang ideal mulai dari perencanaan agenda sampai dengan penilaian akhir kegiatan prakerin dalam bentuk ujian prakerin. Oleh karena itu, pihak SMK perlu meninjau sejauhmana hubungan antara: (1) kelengkapan sarana prasarana dengan prestasi prakerin, (2) prestasi mata pelajaran produktif dengan prestasi prakerin?, (3) bimbingan di industri dengan prestasi prakerin, (4) kelengkapan sarana dengan dengan prestasi prakerin.

**Kata kunci: kompetensi, SMK, DUDI, dan model prakerin.**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) diuraikan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bentuk satuan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan bahwa:

Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, tujuan pendidikan kejuruan secara spesifik adalah untuk meningkatkan: (1) kecerdasan, (2) pengetahuan, (3) kepribadian dan akhlak mulia, (4) serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri, (5) mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, (6) mengembangkan keahlian dan keterampilannya, menguasai bidang keahlian dan dasar-dasar ilmu pengetahuan serta teknologi (iptek), (7) memiliki etos kerja yang tinggi, (8) berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, (9) serta memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri.

Rumusan tersebut secara tersirat memberi makna bahwa tugas pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan lulusannya yang berkualitas yaitu yang memiliki kompetensi, kemandirian, kemampuan kerja yang mampu membuka usaha lapangan kerja sendiri, dan mampu beradaptasi serta berkompetisi. Secara substansial pendidikan kejuruan bertugas membentuk siswa agar mempunyai kemampuan, wawasan, keterampilan di bidang industri yang baik, dan menguasai konsep-konsep rekayasa yang ada di industri (Thomas Sukardi, 2008).

Kualitas pendidikan di SMK masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan pasar apalagi pasar global. Kurikulum SMK dibagi dalam tiga bagian, yaitu: normatif, adaptif, dan produktif, dimana kelompok produktif yang menjadi ciri khas SMK belum memiliki kapasitas dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh sebab itu pendidikan di SMK saat ini belum bisa mengejar kecepatan laju ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan kinerja dunia pendidikan semakin tertinggal

dalam memenuhi kompetensi yang diinginkan oleh DUDI. Ada kesenjangan antara dimensi formatif humanistik pendidikan dan dimensi teknis praktis yang dimiliki lulusan SMK untuk dapat memasuki dunia kerja sebab peralatan yang ada tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dunia kerja. Kemajuan teknologi ternyata lebih cepat maju dan berkembang dibanding kesiapan lembaga pendidikan dalam mencermati kurikulum, metode, dan sarana yang dimilikinya agar menghasilkan orang-orang yang siap memasuki dunia kerja. Tidak ada kontinuitas antara teori yang diterima di sekolah dengan praktik yang dibutuhkan di tempat kerja (Subarkah, 2007).

Untuk memperoleh kompetensi sesuai yang diharapkan oleh dunia kerja, bentuk pembelajaran di SMK yaitu berupa pelatihan keahlian yang mengarah pada pencapaian kompetensi lulusan. Kegiatan pembelajaran dengan memberikan pengalaman produksi pada lini produksi bagi siswa baik dalam praktik kerja industri (Prakerin), maupun pengembangan Unit Produksi/Jasa (UP/J) sekolah atau pengembangan *Teaching Factory* di sekolah.

Kombinasi pembelajaran teori di ruang kelas dan perpustakaan (*theoretical learning*) dan pembelajaran praktik di laboratorium (*practical learning*) dirancang sedemikian rupa dalam rangka menghasilkan lulusan dengan tingkat mutu tertentu yang siap memasuki dunia kerja. Keberhasilan pendidikan vokasional (SMK) tidak hanya diukur dari segi mutunya saja melainkan juga dari segi relevansinya. Hubungan mutu dan relevansi ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Mutu lulusan pendidikan vokasional (SMK) dianggap relevan oleh para pengguna lulusan, yang dalam hal ini adalah sektor DUDI apabila apa yang mereka dapatkan sama dengan atau lebih besar dari yang mereka harapkan. Kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya, dimana DUDI menilai bahwa lulusan pendidikan vokasional (SMK) belum siap kerja, mereka *over qualified but under experience* (Ellis, N, 1999). Wardiman (Anwar, 2001: 9) menyebutkan bahwa pelaksanaan pembelajaran komponen pendidikan adaptif dan teori kejuruan menjadi tanggung jawab sekolah. Komponen pendidikan praktik dasar profesi dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara sekolah dengan dunia usaha/industri pasangannya, sedangkan komponen pendidikan praktek keahlian profesi menjadi tanggung jawab industri pasangan masing-masing sekolah dalam pelaksanaan prakerin. Kebijakan ini muncul karena disadari bahwa penguasaan keahlian professional yang sebenarnya hanya dapat dicapai melalui

kerja nyata di tempat kerja yang sebenarnya dan bukan di sekolah. Sekolah mampu memberikan kemampuan dasar kejuruan yang kuat, sehingga dengan bekal kemampuan dasar kejuruan yang kuat dapat membantu siswa dalam mendalami pelatihan-pelatihan kerja yang lebih kompleks dan spesifik di dunia kerja. Dengan demikian, kemitraan SMK dengan DUDI bukan lagi merupakan hal penting, tetapi merupakan keharusan.

## **B. Tujuan**

Diyakini bahwa pelajaran praktik kejuruan yang diselenggarakan di SMK biarpun ditunjang dengan peralatan yang lengkap dan modern, pada dasarnya hanya mampu menyajikan dasar-dasar keterampilan dalam situasi tiruan (*simulasi*), karena itu sulit diharapkan untuk dapat membentuk keahlian profesional pada siswa. Keahlian profesional yang harus dikuasai pada dasarnya mengandung unsur: (1) pengetahuan teknik, (2) kiat (*arts*). Unsur ilmu pengetahuan dan teknik dapat dipelajari di sekolah, sedangkan unsur “kiat“ adalah sesuatu yang tidak dapat diajarkan, tetapi dapat dikuasai melalui proses pembiasaan (*habit forming*) dan internalisasi. Unsur “kiat“ yang menjadi faktor utama penentu kadar keprofesionalan seseorang hanya dapat dikuasai melalui cara mengerjakan langsung pekerjaan pada bidang profesi itu sendiri, karena itu suatu ukuran keahlian profesional berdasarkan jumlah pengalaman kerja (Aburizal Bakrie, 1996).

Berdasarkan kajian-kajian di atas, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah kondisi proses belajar dan mengajar (PBM) dan pelatihan keterampilan di SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Jateng dan DIY? (2) Bagaimanakah kondisi sarana dan prasarana di SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Jateng dan DIY? (3) Bagaimanakah kondisi hubungan antara: (a) DUDI, (b) Pemerintah, dan (c) Dunia Pendidikan SMK di Jateng dan DIY? (4) Bagaimanakah proses pembelajaran Prakerin untuk menunjang pembentukan keterampilan dan PBM SMK di Jateng dan DIY? (5) Bagaimanakah potret prakerin siswa Program Keahlian Teknik Bangunan untuk menunjang pembentukan keterampilan di Jateng dan DIY?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pendidikan Vokasional

Pendidikan di Indonesia landasan hukumnya adalah Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 20 Tahun 2003. Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 15, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pasal 18 Ayat 1 UU RI tersebut menyebutkan bahwa: (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat (Depdiknas, 2003). Dalam penelitian ini pendidikan vokasional yang akan dibahas adalah pendidikan vokasional tingkat menengah, yaitu pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Depdiknas, 2003).

Pada tahun 2004, Depdiknas mempunyai kebijakan untuk membalik rasio peserta didik SMK dibanding SMA dari 30 : 70 menjadi 67 : 33 pada tahun 2014. Kebijakan ini ditujukan agar keluaran pendidikan dapat lebih berorientasi pada pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pendidikan vokasi dirasa perlu karena memiliki paradigma yang menekankan pada pendidikan yang menyesuaikan dengan permintaan pasar (*demand driven*) guna mendukung pembangunan ekonomi kreatif. Ketersambungan (*link*) di antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan dan kecocokan (*match*) antara *employee* dengan *employer* menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan vokasi. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang (Depdiknas, Renstra 2010 – 2014: 83-85).

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 15 diuraikan bahwa SMK sebagai bentuk satuan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29/1990, pendidikan kejuruan dijelaskan pada tiga tempat. Pada Pasal 1 Ayat 3 dinyatakan bahwa "Pendidikan menengah kejuruan adalah

pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu". Sementara itu, pada Pasal 3 Ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.

Terkait dengan hal tersebut di atas, kunci utama berkembangnya Jerman dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan (*vokasional*) menganut prinsip bahwa pendidikan kejuruan (*vokasional*) akan berjalan secara efektif dan efisien jika kerjasama antara pendidikan dengan, perdagangan, jasa, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dapat terjamin secara berkelanjutan (Edu Benchmarking, 2008).

Pendidikan kejuruan adalah salah satu bentuk dari sub-sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan ini mempunyai misi untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan dan sikap profesionalnya, mampu berkompetisi, dan mampu dalam meniti tahap-tahap perkembangannya agar dapat mempersiapkan dirinya dalam bekerja dan berkarier di dunia tenaga kerja. Tujuan pendidikan kejuruan secara spesifik adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, mengembangkan keahlian dan keterampilannya, menguasai bidang keahlian dan dasar-dasar ilmu pengetahuan serta teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri berdasarkan Permen Diknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi (Thomas Sukardi, 2008).

Rumusan tersebut secara tersirat memberi makna bahwa tugas pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan lulusannya yang berkualitas, yaitu yang memiliki kompetensi, kemandirian, kemampuan kerja yang mampu membuka usaha lapangan kerja sendiri, dan mampu beradaptasi serta berkompetisi. Secara substansial pendidikan kejuruan bertugas membentuk siswa agar mempunyai kemampuan, wawasan, keterampilan di bidang industri yang baik, dan menguasai konsep-konsep rekayasa yang ada di industri (Thomas Sukardi, 2008).

Pendidikan vokasional/ kejuruan merupakan pendidikan yang bersifat khusus (terspesialisasi) dan meliputi semua jenis dan jenjang pekerjaan. Pendidikan vokasi

sesungguhnya *concern* dengan mental, *manual skills, values, dan attitudes*. Oleh karena itu, di dalam pendidikan vokasi secara implisit terkandung unsur-unsur berpikir (*cognitive*), berbuat (*psychomotor*), dan rasa (*affective*) (Wenrich dan Wenrich, 1974: 8).

Pada abad XXI terjadi kecenderungan yang ditandai oleh peningkatan kompleksitas teknologi dan munculnya gerakan restrukturisasi korporatif yang menekankan kombinasi kualitas teknologi dan manusia, menyebabkan dunia kerja akan memerlukan orang yang dapat mengambil inisiatif, berpikir kritis, kreatif, dan cakap memecahkan masalah. Hubungan manusia-mesin bukan lagi merupakan hubungan mekanistik akan tetapi merupakan interaksi komunikatif yang menuntut kecakapan berpikir tingkat tinggi. Kecenderungan-kecenderungan tersebut mulai direspon oleh dunia pendidikan di Indonesia, yang semenjak tahun 2000 menerapkan empat pendekatan pendidikan, yakni: (1) pendidikan berorientasi kecakapan hidup (*life skills*), (2) kurikulum dan pembelajaran berbasis kompetensi, (3) pembelajaran berbasis produksi, dan (d04) pendidikan berbasis luas (*broad-based education*). Orientasi baru pendidikan itu berkehendak menjadikan lembaga pendidikan sebagai lembaga pendidikan kecakapan hidup dengan pendidikan yang bertujuan mencapai kompetensi, selanjutnya disebut pembelajaran berbasis kompetensi dengan proses pembelajaran yang otentik dan kontekstual yang dapat menghasilkan produk bernilai dan bermakna bagi siswa, dan pemberian layanan pendidikan berbasis luas melalui berbagai jalur dan jenjang pendidikan yang fleksibel *multi-entry-multi-exit* (Depdiknas, 2003).

Menurut Hadiwaratama (2002: 3-6) dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan (vokasional) hendaknya mengikuti proses: (1) pengalihan ilmu (*transfer of knowledge*) ataupun penimbaan ilmu (*acquisition of knowledge*) melalui pembelajaran teori; (2) pencernaan ilmu (*digestion of knowledge*) melalui tugas-tugas, pekerjaan rumah, dan tutorial; (3) pembuktian ilmu (*validation of knowledge*) melalui percobaan-percobaan di laboratorium secara empiris atau visual (*simulasi atau virtual reality*); (4) pengembangan keterampilan (*skills development*) melalui pekerjaan-pekerjaan nyata di bengkel praktik sekolah, di *Training Center* atau magang di industri. Dari ke empat tahapan proses tersebut keterampilan merupakan yang paling esensial keberadaannya dalam pendidikan kejuruan.

Institusi pendidikan vokasional (SMK) harus menggalang kerjasama dengan *stakeholders* untuk bersama-sama menyelaraskan kurikulum yang akan dimplementasikan di dalam proses belajar mengajar (PBM) dan pelatihan. Kompetensi produktif adalah pendekatan pendidikan dan pelatihan yang merujuk kepada kriteria keahlian DUDI dengan menggunakan proses produksi sebagai wahana pembelajaran. Pembelajaran berbasis pengalaman yang didapatkan di tempat kerja (*experiential learning*) membekali siswa dengan *job ready skills* yang berpotensi meningkatkan *employability skills* lulusan. Sesuai dengan konsep pembelajaran dari David Kolb (2001) bahwa pembelajaran yang total dan tuntas terjadi apabila pembelajarannya terdapat unsur pengalaman konkrit di samping pembelajaran reflektif, pembelajaran abstraktif konseptualistik, dan pembelajaran eksperimen (pembuktian).

## **B. Peran Dunia Usaha dan Industri (DUDI)**

Tataran era masyarakat ekonomi baru yang berbasis pengetahuan memunculkan paradigma baru yang memunculkan DUDI menjadi tempat pembelajaran yang syah dan penghasil pengetahuan baru yang relevan yang mungkin akan meruntuhkan posisi monopoli pendidikan tinggi dan sekolah-sekolah, sebagai satu-satunya pusat pembelajaran dan sumber penghasil pengetahuan.

Dari hasil survei dan observasi di lapangan perusahaan korporasi multinasional Unilever yang mengidentifikasi sebagai *learning organisation* memiliki *learning center* yang berlokasi di sekitar Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Terjadinya pergeseran dalam DUDI di mana pusat-pusat pelatihan (*training center*) yang dimiliki berubah fungsi dari penyedia pelatihan (*training provider*) menjadi lebih ke fasilitator pembelajaran (*facilitator of learning*). Pembelajaran adalah suatu proses untuk membangun pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan kemampuan-kemampuan baru, sedangkan pelatihan adalah salah satu dari tanggapan-tanggapan suatu organisasi untuk mempromosikan pembelajaran.

Pembelajaran digali dimana saja, kapan saja, tidak hanya dari program pelatihan dan tidak hanya sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan rentang kemampuan. Perbedaan budaya organisasi antara sekolah atau perguruan tinggi dan DUDI merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya program magang yang sekarang

berjalan, terutama ketidaksamaan pengertian antara *learning* dan *knowledge* (Roodhouse, 2005).

Dari sudut pandang relevansi, DUDI mendefinisikan pengetahuan (*knowledge*) sebagai sesuatu yang dihasilkan dalam konteks aplikasi, yang berbeda dari pengetahuan berbasis disiplin keilmuan yang konvensional. DUDI siap menjadi pencipta pengetahuan, mengaplikasikan, dan memanfaatkan pengetahuan baru tersebut di tempat kerja. Pengetahuan baru tersebut sifatnya praktis, interdisipliner, informal, terapan, dan kontekstual dari pada teoritis disipliner, dan dapat digeneralisasi yang relevansinya tidak lagi diartikan sebagai aplikasi pengetahuan di tempat kerja melainkan tempat kerja itu sendiri sebagai suatu tempat pembelajaran. Menurut DUDI yang dimaksud dengan pembelajaran (*learning*) dapat diperoleh melalui kerja di tempat kerja dan menjadi bagian dari kerja. Lahirnya era ekonomi pengetahuan baru dan zaman masyarakat pembelajaran (*knowledge economy era and learning age society*) membawa implikasi mendasar terhadap eksistensi dan kelangsungan hidup pendidikan vokasi (SMK). Dalam era tersebut ekonomi menjadi panglima. Keberhasilan ekonominya sangat ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan baru dihasilkan, pengetahuan-pengetahuan baru tersebut tercipta di tempat kerja. Contohnya antara lain inovasi berupa kekayaan intelektual yang dihak patenkan.

Pada zaman masyarakat pembelajaran, DUDI bertambah perannya menjadi pusat/sumber pembelajaran (*learning organization*). Beberapa keterampilan dan pengetahuan yang relevan lebih tepat didapatkan di tempat kerja dari pada di sekolah. Hal lain yang mungkin merintang upaya “kolaborasi kemitraan magang“ adalah ketentuan tentang kurikulum pendidikan vokasi (SMK) yang harus mematuhi sistem penjaminan mutu yang berlaku di lingkungan pendidikan dan secara implisit seakan-akan dipaksakan kepada DUDI untuk mengikutinya.

## **C. Kompetensi dan Profesional Kerja**

### **1. Pengertian Kompetensi**

Menurut Finch (1979), kompetensi kejuruan merupakan tugas (*tasks*), keterampilan (*skills*), sikap (*attitudes*), nilai (*values*), dan apresiasi (*appreciations*) yang dianggap penting untuk mencapai sukses dalam pekerjaan. Selanjutnya Grubb (1999) menyatakan: *The competencies may be cognitive, ..., noncognitive skills, and abilities*

*may be particularly important including manual or kinaesthetic skills,...spatial or visual skills,...interpersonal skills.*

Jadi kompetensi yang diperlukan dalam praktik dapat berupa kompetensi yang bersifat kognitif, non-kognitif termasuk keterampilan kinestetik (gerak), seperti keterampilan mengelas, keterampilan spasial (memahami gambar tiga dimensi), dan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk kerjasama tim yang solid. Dengan demikian, kompetensi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu substansinya (tugas) dan kualitasnya. Substansi dalam kompetensi merupakan isi dari tugas yang harus dilakukan oleh siswa. Tugas secara garis besar dikelompokkan dalam berbagai elemen struktur kurikulum, seperti: pendidikan, dasar keahlian, dan keahlian. Sedangkan kualitas kompetensi, Reiser (1996) membagi dalam bentuk taksonomi hasil belajar: (1) *knowledge*, (2) *intellectual skills*, (3) *motor skill*, dan (4) *attitudes*.

Kemudian Bloom, Krathwhol, Masia, dan Simpson dalam Beane (1986) membagi dalam tiga ranah yang masing-masing memiliki tingkatan kualitasnya. Ranah pertama adalah kognitif yang terdiri atas pengertian (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), aplikasi (*aplication*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*). Ranah kedua adalah afektif yang terdiri atas menerima (*receiving*), merespon (*responding*), penghargaan (*valuing*), mengorganisasikan (*organization*), dan karakter oleh suatu nilai (*characterization by value*). Ranah ketiga adalah psikomotor yang terdiri atas: persepsi (*perception*), kesiapan (*set*), respon terbimbing (*guided response*), mekanistik (*mechanism*), terampil merespon (*complex overt response*), adaptasi keterampilan (*adaptation*), gerakan yang kreatif (*origination*) Taksonomi Bloom, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi>). Menyadari bahwa globalisasi merupakan tantangan sekaligus peluang, maka dalam era ini perlu secara bersama-sama dirumuskan kebijakan dan strategi pengembangan SDM Indonesia. Untuk pengembangan SDM perlu memperhatikan hal-hal berikut: (1) Kecepatan perubahan dan kemajuan teknologi yang diterapkan di DUDI, menuntut adanya SDM yang memiliki kemampuan beradaptasi dan daya yang lentur untuk menghadapinya. (2) Tinggi dan ketatnya persaingan global menuntut DUDI melakukan rencana strategik yang berdampak pada tuntutan dan penyesuaian organisasi yang lentur dan penyesuaian organisasi tersebut akan mempengaruhi pada jabatan-jabatan yang ada. (3) Dengan

adanya tuntutan bentuk organisasi yang cenderung berubah, pengembangan SDM yang mengacu kepada standar jabatan yang baku/tetap, akan cepat tertinggal, maka perlu dicari model pendekatan lain yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. (4) Telah diperkenalkan dan dipakai model standar kompetensi oleh *Internasional Labour Organization (ILO)* di beberapa negara Asia Pasifik yang dinyatakan “*Compatible*” secara internasional. (5) Menjelang akhir abad ke-20, beberapa negara maju telah memperkenalkan dan menerapkan suatu model yang dikenal dengan “*Regional Model Competency Standard*” yang lebih memadai dan lentur dalam menghadapi perubahan-perubahan yang cepat (Eko Purwono dan Tim, 2002).

Berdasarkan berbagai pengertian kompetensi di atas, dapat diambil kesimpulan pengertian yang sederhana, kompetensi adalah kemampuan kerja seseorang yang mencakup aspek pengetahuan, pengetahuan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar kompetensi adalah pernyataan-pernyataan mengenai pelaksanaan tugas/pekerjaan di tempat kerja yang digambarkan dalam bentuk hasil luaran, sebagai berikut:

- 1) Apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh pekerja.
- 2) Tingkat kesempurnaan pelaksanaan kerja yang diharapkan dari pekerja.
- 3) Bagaimana menilai bahwa kemampuan pekerja telah berada pada tingkat yang diharapkan.

Standar kompetensi dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap kerja dan penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan. Standar kompetensi tidak berarti hanya kemampuan menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan, tetapi dilandasi pula bagaimana dan mengapa tugas itu dikerjakan. Dengan kata lain, standar kompetensi meliputi faktor-faktor yang mendukung, seperti pengetahuan dan kemampuan untuk mengerjakan suatu tugas dalam kondisi normal di tempat kerja serta kemampuan menransfer dan menerapkan kemampuan dan pengetahuan pada situasi dan lingkungan yang berbeda.

## **2. Pengertian Profesional**

Pengembangan profesionalisme SDM mempersyaratkan perlu adanya jalur pengembangannya, sehingga memungkinkan tenaga-tenaga profesi untuk selalu

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, tanggungjawab, dan wewenangnya. Hal ini mengingat bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis terdapat pembagian tugas yang berjenjang, sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, tanggungjawab dan wewenangnya. Pengakuan keahlian merupakan dasar bagi seseorang untuk memperoleh kompetensi. Tanpa memiliki pengetahuan kerja yang diperlukan, seseorang tidak mungkin memiliki keterampilan kerja yang dipersyaratkan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen pada umumnya seseorang tidak mungkin memiliki sesuatu pengetahuan dan keterampilan tanpa melalui pendidikan yang memberikan landasan bagi keterampilan dan pengetahuan tersebut. Atas dasar pendekatan tersebut, maka penentuan kemampuan seyogyanya didasarkan pada pendidikan, pengalaman kerja sebagai unsur pematap keterampilan dan pengetahuan kerja, sikap dan kebiasaan.

Keahlian profesional yang harus dikuasai pada dasarnya mengandung unsur: (1) pengetahuan teknik, dan (2) kiat (*arts*). Unsur ilmu pengetahuan dan teknik dapat dipelajari di sekolah, sedangkan unsur “*kiat*” adalah sesuatu yang tidak dapat diajarkan, tetapi dapat dikuasai melalui proses pembiasaan (*habit forming*) dan internalisasi. Unsur “*kiat*” yang menjadi faktor utama penentu kadar keprofesionalan seseorang hanya dapat dikuasai melalui cara mengerjakan langsung pekerjaan pada bidang profesi itu sendiri, karena itu suatu ukuran keahlian profesional berdasarkan jumlah pengalaman kerja (Aburizal Bakrie, 1996)

Apa sesungguhnya profesionalisme itu? Menurut Rosenzweig (1979) bahwa pengertian profesional terkait dengan ciri-ciri sebagai berikut:

*(1) Profession have a systematic body of theory. Skill is achieve through a lengthy process of training. (2) The profesional has authority based upon superior knowledge which is recognized by his clientele.(3) There is a broad social sanction and approval of the exercise of this authority. 4. There is a code of ethics regulating relations profesional persons with clients and with colleagues (4).There is a culture sustained by organizations. A profesional is a member of many formal and informal groups. The interactions of social roles required by these groups generate a social configuration unique to the profession, a profesional culture.*

Ini berarti bahwa profesional tidak sekedar *skill* yang berbasis pengetahuan, namun juga termuat nilai (norma agama, sosial, dan sebagainya) dan sikap. Bagaimana

sesungguhnya profesionalisme dibangun? Melalui pendidikan khusus: pendidikan profesional atau melalui pendidikan vokasi.

Diyakini bahwa pelajaran praktik kejuruan yang diselenggarakan di SMK biarpun ditunjang dengan peralatan yang lengkap dan modern, pada dasarnya hanya mampu menyajikan dasar-dasar keterampilan dalam situasi tiruan (*simulasi*), karena itu sulit diharapkan untuk dapat membentuk keahlian profesional pada siswa (Aburizal Bakrie, 1996).

Selanjutnya di DUDI, ada empat faktor untuk dapat memenangkan pasar dalam persaingan, yaitu: (1) Mutu yang baik, termasuk desain yang mampu menarik selera pasar, (2) Harga yang layak, (3) Waktu pasok (*delivery time*) yang tepat, dan (4) Pelayanan (*servivices*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pendekatan pendidikan di SMK, kompetensinya harus disesuaikan dengan tuntutan DUDI. Metode Pengembangan standar kompetensi dapat dilakukan dengan tiga pendekatan: **Pertama**, dikembangkan dengan pendekatan "**Field Research**". **Kedua**, dikembangkan dengan pendekatan "**Benchmark, Adopt, and Adapt**". **Ketiga**, dikembangkan dengan pendekatan kombinasi dari kedua pendekatan tersebut. Pendekatan "**Field Research**" adalah pendekatan dengan mengadakan riset di lapangan untuk menghimpun data primer tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada, kemudian dirumuskan kedalam rancangan standar kompetensi, divalidasi, diuji coba, dikaji ulang, disosialisasi, disepakati bersama dan ditetapkan. Pendekatan "**Benchmark, Adopt dan Adapt**" adalah pendekatan dengan mempelajari dan membandingkan standar kompetensi yang telah ada dari berbagai negara maju dan kemudian standar kompetensi yang dibutuhkan diadopsi dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan. Setelah melalui validasi, uji coba, sosialisai dan kesepakatan bersama, rancangan standar tersebut ditetapkan sebagai standar kompetensi kompetensi edisi (Eko Purwono dan Tim Penyusun, 2002).

### III. METODE

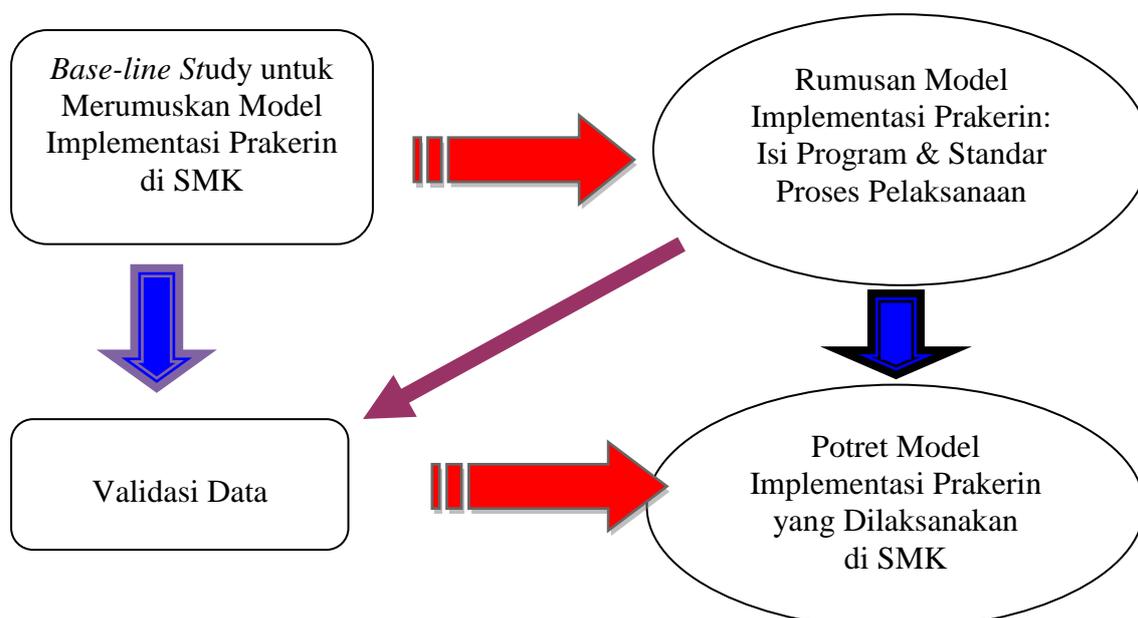
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian dan pengembangan (R and D/*Research and Development*) (Borg, W.R. & Gall, M.D. 1989). Lokasi penelitian di : (1) SMK PIKA, (2) SMK Negeri 7 Semarang, (3) SMK Negeri 5 Surakarta, (4) SMK Santo Paulus Surakarta, (5) SMK Negeri 2 Yogyakarta, (6) SMK Negeri 2

Pengasih, (7) SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Indikator-indikator penelitian meliputi: (1) Manajemen SMK dalam pelaksanaan prakerin, (2) PBM dan Pelatihan/pembekalan prakerin, (3) Kinerja guru dalam prakerin, d) Mitra DUDI SMK yang menjadi sampel penelitian, (5) Fasilitas, sarana dan prasarana PBM dan Pelatihan Keterampilan, (6) Level kualifikasi kompetensi dan hasil produk pendidikan di SMK.

Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: **Penelitian tahap I (tahun 1)**, merupakan *base-line study*. Merupakan deskripsi dan evaluasi, meliputi: (1) Bagaimanakah kondisi Proses Belajar dan Mengajar (PBM) dan Pelatihan Keterampilan SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Jateng dan DIY?. (2) Bagaimanakah kondisi sarana dan prasarana di SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Jateng dan DIY? (3) Bagaimanakah kondisi hubungan antara: (a) Dunia DUDI, (b) Pemerintah, dan (c) Dunia Pendidikan SMK di Jateng dan DIY? (4) Bagaimanakah proses pembelajaran Prakerin untuk menunjang pembentukan keterampilan dan PBM SMK di Jateng dan DIY?

**Penelitian Tahap II** (tahun 2) merupakan hasil dari observasi dan evaluasi model berupa: (1) Menghasilkan rekomendasi model hubungan antara: (a) DUDI, (b) Pemerintah, dan (c) Dunia Pendidikan SMK di Jateng dan DIY. (2) Menghasilkan rekomendasi Model Prakerin untuk menunjang pembentukan keterampilan dan PBM SMK di Jateng dan DIY.

Secara visual, tahapan serta target yang akan dicapai melalui penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Hubungan antara Kelengkapan Sarana Prasarana terhadap Prestasi Praktik Kerja Industri

Kelengkapan sarana prasarana merupakan aspek yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan dan keterampilan siswa dalam melakukan praktik. Di sekolah maupun di industri. Begitu juga sebaliknya bengkel yang lengkap tentu saja akan mempermudah siswa dalam mempraktikkan materi yang didapat. Kondisi tersebut dapat terjadi disebabkan bengkel merupakan fasilitas yang sangat penting bagi sebuah SMK yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran praktik. Bengkel yang lengkap akan mempermudah siswa dalam proses pembelajaran praktik sehingga siswa mempunyai keterampilan dan keahlian yang bagus, tentu saja hal tersebut akan berhubungan/berpengaruh terhadap praktik kerja industri tersebut.

Secara umum kelengkapan sarana prasarana Program Keahlian Bangunan sudah termasuk dalam kategori sangat baik dengan penilaian di atas 85 pada setiap Kompetensi keahlian. Dari hasil wawancara dengan pembimbing prakerin juga menjelaskan bahwa untuk kelengkapan sarana prasarana di SMKN 1 Kota Magelang sudah cukup mendukung kegiatan siswa. Hal tersebut juga memberikan sumbangan bagi siswa dalam pencapaiannya pada saat pelaksanaan prakerin walaupun nilainya tidak terlalu signifikan.

##### 2. Hubungan antara prestasi mata pelajaran produktif terhadap prestasi praktik kerja industri

Prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah siswa tersebut mendapat pengajaran dalam waktu tertentu. Prestasi belajar siswa dalam penelitian ini yaitu berupa nilai rata-rata siswa yang terdapat pada buku rapor. Beberapa

faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar seperti lingkungan, keluarga dan lain sebagainya.

Mata pelajaran yang sudah diajarkan saat di sekolah akan berguna ketika siswa melaksanakan prakerin karena materi yang di berikan di industry tidak berbeda jauh seperti yang diajarkan di sekolah. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan pembimbing prakerin pihak sekolah bahwa materi yang diajarkan di industry relevan dan bersinergi dengan materi yang telah diajarkan di sekolah. Tapi dari hasil peneliiian ini menunjukkan bahwa nilai mata pelajaran produktif tidak memberikan sumbangan yang besar terhadap pelaksanaan prakerin dengan nilai korelasi dibawah 10%. Hal tersebut tidak sesuai dengan (Mulyasa, 2004 :195) bahwa Peserta didik akan berhasil kalau berusaha semaksimal mungkin dengan cara belajar yang efisien sehingga mempertinggi prestasi (hasil) belajar”.

### **3. Hubungan antara bimbingan di industri terhadap prestasi praktik kerja industry**

Hasil prakerin, selain dipengaruhi oleh kelengkapan sarana prasarana dan mata pelajaran produktif juga dipengaruhi oleh factor yang lain yaitu bimbingan di industri. Rendahnya tingkat korelasi antara bimbingan di industri dengan prestasi prakerin, menunjukan bahwa pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan ketika siswa melaksanakan praktik kerja industri belum maksimal. Kurang maksimalnya bimbingan di industri dikarenakan pembimbing di industri merupakan karyawan yang harus menyelesaikan tanggung jawab yang dibebankan.

Siswa yang enggan meminta petunjuk kepada pembimbing saat mendapatkan kesulitan menjadikan salah satu faktor penghambat perkembangan skill siswa. Faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi prakerin siswa meliputi faktor intern berupa aspek psikologis lainnya (kecerdasan, bakat, minat, dan kecakapan), serta faktor ekstern berupa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan bengkel. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang pernah dilaksanakan sebelumnya

## V. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode survei, dokumentasi, dan wawancara dapat disimpulkan sebagai berikut.

**Pertama**, akan dapat dilihat sejauhmana hubungan antara: (1) hubungan antara kelengkapan sarana prasarana dengan prestasi praktik kerja industri siswa kelas XI Program Keahlian Bangunan?, (2) hubungan antara prestasi mata pelajaran produktif dengan prestasi praktik kerja industri siswa kelas XI Program Keahlian Bangunan?, (3) hubungan antara bimbingan di industri dengan prestasi praktik kerja industri siswa kelas XI Program Keahlian Bangunan?, (4) hubungan antara kelengkapan sarana dengan dengan prestasi praktik kerja industri siswa kelas XI Program Keahlian Bangunan? **Kedua**, model manajemen prakerin yang dilaksanakan belum ideal sebab dalam implementasi manajemen prakerin tersebut belum ada tahap: (1) ujian pembekalan, (2) tahapan bagi siswa yang tidak lulus pembekalan, (3) tahap bagaimana bila pencarian tempat prakerin oleh siswa/guru tersebut ditolak oleh pihak industri, (4) tahap bimbingan penyusunan laporan prakerin, dan (5) ujian prakerin. **Ketiga**, dengan demikian perlu adanya penyusunan model manajemen implementasi prakerin yang ideal

mulai dari perencanaan agenda sampai dengan penilaian akhir kegiatan prakerin dalam bentuk ujian prakerin.

Berdasarkan hasil sementara dalam pelaksanaan penelitian ini: **Pertama**, pihak SMK perlu melihat sejauhmana hubungan antara: (1) kelengkapan sarana prasarana dengan prestasi praktik kerja industri Program Keahlian Bangunan?, (2) prestasi mata pelajaran produktif dengan prestasi praktik kerja industri siswa Program Keahlian Bangunan?, (3) bimbingan di industri dengan prestasi praktik kerja industri siswa I Program Keahlian Bangunan?, (4) kelengkapan sarana dengan dengan prestasi praktik kerja industri siswa Program Keahlian Bangunan? **Kedua**, perlu adanya perbaikan manajemen prakerin yang lebih ideal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aburizal Bakrie. (1996). *Konsep Pendidikan Sistem Ganda, pada Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia*. Jakarta: Majelis Pendidikan Kejuruan Indonesia.
- Anwar. (2001). *Pelaksanaan Program Pendidikan Sistem Ganda Pada SMK di Kota Kendari*. Dari [www.depdiknas.go.id/jurnal/41/Anwar.htm](http://www.depdiknas.go.id/jurnal/41/Anwar.htm).
- Borg, W.R. & Gall, M.D. (1989). *Educational research: an introduction*. Fifth edition. New York: Longman
- Depdiknas. (2001). *Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2001). *Reposisi Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020*. Jakarta: Ditjen, Dikdasmen, Direktorat Dikmenjur.
- Depdiknas. (2004). *Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Edisi 2004*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Depdiknas. (2009). *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014*, Tanggal 17 September 2009. Jakarta: Depdiknas.

- Depdiknas. (2008), , *Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran*. Materi Workshop Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran di LPTK. Jakarta: Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Edu Benchmarking. (2008). Link and Match Model Pendidikan Kejuruan di Jerman. *Majalah Pemandu Pendidikan Bertaraf Internasional*. 25 September 2008.
- Ellis, N. (1999). Developing Graduate Sales Professionals Through Co-Operative Education and Work Placements: A Relationship Marketing Approach, *Journal of European Industrial Training* 24/1 (2000) 34-42.
- Eko Purwono dan Tim Penyusun. (2002). *Standard Kompetensi Nasional Bidang Teknologi Perkayuan*. Jakarta: LPPM ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Bagian Proyek Sistem Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi.
- Subarkah. (2007). *Vocational Education Global Development Center*. Semarang: Program Pasca Sarjana (S3) UNNES
- Hadiwaratama. (1995). Pengarahan Mendikbud Kepada Satuan Tugas Perumus Kebijakan Pengembangan Pendidikan Kejuruan. *Makalah Disampaikan pada Tanggal 28 April 1995 di Jakarta*.
- Roodhouse, S. (2005). *Work Based Learning*. [http://www.uvac.ac.uk/downloads/0401publications/int\\_wbl.pdf](http://www.uvac.ac.uk/downloads/0401publications/int_wbl.pdf).
- Taksonomi Bloom. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi>).
- Thomas Sukardi. (2008). Pengembangan Model Bengkel Kerja Praktik Sekolah Menengah Kejuruan. *Disertasi Program Doktor*. Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Tanggal: 30 Juni 2008.
- Wenrich, R.C., dan Wenrich, J.W. (1974). *Leadership in Administration of Vocational and Technical Education*. Columbus: Charles E MerrillPublishing Company, A Bell & Howell Company.
- Wardiman Djojonegoro. (1998). *Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset.